

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika politik global dewasa ini, hubungan bilateral menjadi fondasi utama dari sistem hubungan internasional. Secara historis, hubungan bilateral sering kali terbentuk melalui kesamaan nilai, kedekatan geopolitik, atau kepentingan strategis tertentu. Namun, dalam praktik modern, hubungan bilateral semakin diperluas cakupannya ke ranah non-tradisional seperti pendidikan, teknologi, energi terbarukan, hingga kerja sama budaya. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan internasional dari pendekatan kekuatan keras (*hard power*) menuju kekuatan lunak (*soft power*), di mana pendekatan kolaboratif dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam membangun kemitraan antarnegara.

Salah satu contoh hubungan bilateral yang menunjukkan perkembangan dinamis lintas sektor adalah hubungan antara Indonesia dan Jerman. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik resmi sejak tahun 1952, tidak lama setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Sejak saat itu, kedua negara terus memperkuat kemitraan mereka dalam berbagai sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Hubungan ini bahkan dikategorikan sebagai salah satu hubungan bilateral terpanjang Indonesia dengan negara di kawasan Eropa (Laoli dan Aditiany, 2024). Puncak dari penguatan kerja sama ini terjadi pada tahun 2012 melalui penandatanganan *The German-Indonesian Joint Declaration for A Comprehensive Partnership*:

Shaping Globalization and Sharing Responsibility, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kanselir Angela Merkel. Deklarasi tersebut menjadi kerangka kerja sama komprehensif yang bertujuan membangun hubungan bilateral yang efektif, setara, dan strategis. Melalui deklarasi ini, Indonesia dan Jerman menyepakati penguatan kolaborasi di bidang perdagangan, pendidikan, riset dan teknologi, energi terbarukan, ketahanan pangan, serta maritim (Laoli dan Aditiany, 2024).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hubungan bilateral ini semakin diperkuat, terutama dengan kunjungan resmi ke Berlin pada tahun 2016 yang menghasilkan tiga bidang prioritas dalam kerjasama kedua negara, yakni pendidikan vokasi, energi terbarukan, dan sektor kemaritiman (Laoli dan Aditiany, 2024). Kerja sama di bidang pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, menjadi sangat menonjol karena mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia, yang saat ini tengah menghadapi tantangan ketenagakerjaan akibat rendahnya produktivitas dan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Di sektor ekonomi, Jerman menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia di Eropa. Berdasarkan data dari berbagai sumber, volume perdagangan antara kedua negara menunjukkan tren positif dalam dekade terakhir. Indonesia mengeksport berbagai produk utama ke Jerman, seperti kopi, tekstil, dan produk elektronik, sementara Jerman mengeksport barang-barang berteknologi tinggi ke Indonesia, termasuk mesin industri dan alat kesehatan (Rifandi dan Prakoso, 2022).

Tercatat bahwa sejak 2012, dinamika perdagangan antara Indonesia dan Jerman cenderung dinamis menuju ke arah yang positif. Pada tahun 2012, ekspor Indonesia ke Jerman mencapai 5,19 milyar dollar sedangkan ekspor Jerman ke Indonesia berada di angka 4,2 milyar dollar. Selanjutnya di tahun 2013, ekspor Jerman ke Indonesia turun mencapai 4,72 milyar dollar sedangkan ekspor Jerman ke Indonesia meningkat menjadi 4,3 milyar dollar. Di tahun 2014, ekspor Indonesia ke Jerman berada di angka 4,86 milyar dollar sementara impor Indonesia yang berasal dari Jerman turun di angka 4,17 milyar dollar. Kemudian pada tahun 2015, ekspor Indonesia ke Jerman berada di angka 4,45 milyar dollar dan ekspor Jerman ke Indonesia mencetak nilai perdagangan sebesar 3,36 milyar dollar. Terjadi penurunan di tahun 2016 dengan nilai ekspor Indonesia ke Jerman mencapai 4,22 milyar dollar sedangkan nilai ekspor Jerman ke Indonesia turun mencapai 2,97 milyar dollar (Observatory of Economic Complexity, n.d.).

Peningkatan nilai perdagangan kembali terjadi di tahun 2017, yang mana ekspor Indonesia ke Jerman mencapai 4,45 milyar dollar sedangkan ekspor Jerman ke Indonesia mencetak nilai 3,41 milyar dollar. Tren positif ini berlanjut di tahun 2018 dengan ekspor Indonesia ke Jerman memiliki nilai 4,54 milyar dollar sementara ekspor Jerman ke Indonesia menjadi 3,92 milyar dollar. Dari 2019 hingga 2020 sempat terjadi penurunan, yang mana salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19, dengan nilai ekspor Indonesia ke Jerman pada tahun 2020 mencapai 3,98 milyar dollar sedangkan ekspor Jerman ke Indonesia menjadi 2,74 milyar dollar. Pemulihan perdagangan antara kedua

negara mulai terasa di tahun 2021 dengan ekspor Indonesia ke Jerman yang meningkat hingga 4,7 milyar dollar dan ekspor Jerman ke Indonesia berada di angka 3,11 milyar. Angka ini kembali meningkat di tahun 2022 dengan nilai ekspor Indonesia ke Jerman yang mencapai 5,62 milyar dan nilai ekspor Jerman ke Indonesia di angka 3,48 milyar (Observatory of Economic Complexity, n.d.). Fakta ini menandakan adanya simbiosis ekonomi yang saling menguntungkan dan menjadi dasar kuat bagi stabilitas kerja sama jangka panjang.

Kolaborasi Indonesia-Jerman berkembang tidak hanya pada bidang ekonomi maupun perdagangan, namun juga di bidang pendidikan kejuruan dan kebudayaan. Program Ausbildung yang didasarkan pada sistem sekolah Jerman adalah salah satu bentuk praktis dari kerja sama pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan memberikan pelatihan vokasional. (Laoli dan Aditiany, 2024). Di sisi lain, kerja sama di bidang kebudayaan juga memainkan peran strategis dalam mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.

Salah satu bentuk upaya menjaga hubungan bilateral adalah dengan menerapkan upaya diplomasi. Dalam dinamika hubungan internasional modern, diplomasi tidak lagi terbatas pada interaksi politik atau ekonomi semata, melainkan telah berkembang mencakup dimensi budaya yang berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan yang lebih humanis dan berkelanjutan antarnegara. Konsep diplomasi kebudayaan menjadi semakin penting dalam kerangka hubungan bilateral, terutama ketika dua negara

memiliki sejarah interaksi panjang dan kepentingan strategis, sebagaimana terlihat dalam relasi antara Indonesia dan Jerman.

Pada dasarnya diplomasi budaya adalah jenis *soft power* yang membantu sebuah negara memproyeksikan citra positif, memperluas pemahaman antarbudaya, serta mempererat hubungan antar masyarakat lintas negara. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan alat diplomasi budaya ini. Menurut Warsito dan Kartikasari (2007), diplomasi budaya dapat terjadi dalam kondisi dan situasi apa pun, baik sedang dalam situasi damai, krisis, maupun saat konflik, sehingga menjadikannya sebagai sarana yang fleksibel dan efektif untuk memperkuat posisi suatu negara di kancah global.

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong penggunaan diplomasi kebudayaan sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat relasi luar negeri, termasuk terhadap Jerman. Implementasi diplomasi budaya Indonesia terhadap Jerman dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penyelenggaraan kegiatan seni, pengajaran bahasa Indonesia, promosi produk budaya seperti batik dan gamelan, hingga pendirian institusi kebudayaan di luar negeri, seperti Rumah Budaya Indonesia (Yuza, 2016). Rumah Budaya Indonesia merupakan fasilitas publik yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai sarana untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan keragaman serta kekayaan budaya Indonesia kepada publik internasional. Di Berlin, keberadaan Rumah Budaya ini memainkan peran sebagai pusat informasi dan promosi budaya

Indonesia, serta menjadi jembatan penghubung antara komunitas Indonesia dan masyarakat Jerman. Program-program yang dijalankan mencakup pameran seni, pertunjukan tari dan musik tradisional, kelas bahasa Indonesia, dan diskusi budaya, yang secara langsung menyasar publik Jerman maupun diaspora Indonesia (Yuza, 2016).

Pemerintah Indonesia merealisasikan praktik diplomasi kebudayaan secara konkret melalui penyelenggaraan kursus gamelan di Hamburg, Jerman, yang dinamakan “Kosmo Gamelan”, sebagai sarana memperkenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat internasional. Dalam program ini, warga Jerman, termasuk kalangan lansia, diajak untuk belajar memainkan gamelan Jawa dan Bali, dengan tujuan membangun dialog budaya yang partisipatif. Program ini bahkan mendapat dukungan dari media lokal seperti Deutschlandradio Kultur yang meliput kegiatan tersebut sebagai upaya pertukaran budaya yang inovatif (Yuza, 2016). Selain gamelan, kegiatan lain yang menonjol adalah pameran batik. Pameran ini secara rutin diselenggarakan sebagai upaya untuk memperkenalkan batik kepada masyarakat internasional sebagai warisan budaya Indonesia yang telah memperoleh pengakuan dari UNESCO. Pameran ini tidak hanya menampilkan karya seni, tetapi juga menyampaikan narasi sejarah dan filosofi di balik setiap motif batik, yang membantu membentuk pemahaman dan apresiasi masyarakat Jerman terhadap identitas budaya Indonesia (Yuza, 2016).

Tidak hanya dari pihak Indonesia, pemerintah Jerman juga secara aktif mendorong kerja sama kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi publiknya.

Misalnya, melalui berbagai kolaborasi dengan lembaga-lembaga lokal di Indonesia untuk menyelenggarakan konser, pameran seni, dan program pertukaran pelajar. Upaya ini mencerminkan karakter bilateral dari praktik diplomasi kebudayaan, di mana kedua negara berperan tidak hanya sebagai pengirim nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai penerima sekaligus partisipan aktif dalam dialog budaya lintas batas. (Laksono, 2024).

Salah satu bukti diplomasi budaya antara Indonesia dan Jerman adalah Goethe-Institut. Instansi ini merupakan lembaga kebudayaan resmi Pemerintah Republik Federal Jerman yang beroperasi di lebih dari 90 negara, termasuk Indonesia. Sejak pendiriannya pada tahun 1951 sebagai kelanjutan dari Deutsche Akademie, Goethe-Institut diberi mandat untuk memperkuat penyebaran bahasa Jerman, memperkenalkan kebudayaan Jerman, serta membangun kerja sama antarbudaya (Goethe-Institut, 2016). Di Indonesia, Goethe-Institut memiliki kantor utama di Jakarta dan cabang di beberapa kota besar, serta telah berkiprah lebih dari lima dekade dalam mempererat hubungan kebudayaan Indonesia-Jerman.

Goethe-Institut sendiri memiliki sejarah panjang sejak pendiriannya. Deutsche Akademie yang didirikan pada tahun 1925 menjadi cikal bakal dari Goethe-Institut. Institut kebudayaan tersebut pada awalnya didirikan oleh sekelompok akademisi dan diplomat dengan tujuan menyebarkan budaya dan bahasa Jerman di luar negeri. Hal ini kemudian disusul pada tahun 1932, yang mana Deutsche Akademie membentuk “*Goethe-Institut zur Fortbildung ausländischer Deutschlehrer*”, program pelatihan bahasa Jerman bagi

masyarakat luar negeri yang ingin menjadi guru bahasa Jerman. Namun, akibat keterkaitannya dengan Nazi pada Perang Dunia Kedua dan fungsinya sebagai instrumen ideologis, Deutsche Akademie kemudian dibubarkan pada tahun 1945 (Lentz & Gabriel, 2021).

Kemudian pada tahun 1951, beberapa mantan anggota Deutsche Akademie mendirikan organisasi yang serupa untuk melanjutkan program institut tersebut. Namun, keterkaitan Deutsche Akademie dengan Nazi pada Perang Dunia Kedua mendorong para pendiri untuk membentuk kembali institut serupa dengan nama Goethe-Institut, yang mana dibentuk sebagai organisasi perantara independen dengan dukungan pemerintah Jerman sebagai bentuk *soft power* pasca-perang, sesuai dengan namanya yang membawa nilai-nilai humanisme. Kursus bahasa Jerman pertama yang diadakan oleh Goethe-Institut pertama kali digelar pada tahun 1953 di kota Bad Reichenhall, Murnau, dan Kochel (Lanshina, 2015).

Kemudian pada masa Perang Dingin, Goethe-Institut berkembang dalam pengembangan pengajaran bahasa dan penyebaran budaya Jerman secara global, yang mana eksistensinya diintegrasikan ke dalam strategi *nation branding* dari Jerman Barat. Strategi dengan memanfaatkan Goethe-Institut ini diterapkan untuk memperkuat citra Jerman Barat agar lebih baik dibandingkan Jerman Timur. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya Goethe-Institut di banyak negara, salah satunya Indonesia di tahun 1962, dan aktivitas institut tersebut dalam menggelar kegiatan budaya dan pertukaran seni Jerman (Lentz & Gabriel, 2021).

Peran utama Goethe-Institut dalam diplomasi budaya terwujud dalam tiga program utama, yaitu pendidikan dan pelatihan bahasa Jerman, penyelenggaraan program seni dan budaya, serta penguatan jejaring dan dialog antarbudaya. Sebagai salah satu lembaga yang aktif di bidang bahasa dan kebudayaan, Goethe-Institut menjadi sarana penting dalam memperluas eksistensi bahasa Jerman di luar negeri serta memperkenalkan nilai-nilai budaya Jerman kepada masyarakat internasional, termasuk Indonesia (Utama, 2015).

Dalam hal pengajaran bahasa, Goethe-Institut menyelenggarakan kursus bahasa Jerman dalam berbagai tingkatan, baik secara daring maupun luring. Selain itu, Goethe-Institut juga aktif dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui program pelatihan profesional yang dirancang secara sistematis. Institusi ini juga mengembangkan materi ajar yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan belajar generasi masa kini. Goethe-Institut juga menjadi penyelenggara resmi ujian sertifikasi kemampuan bahasa Jerman seperti Goethe-Zertifikat, yang diakui secara internasional. Sertifikasi ini banyak dimanfaatkan oleh pelajar dan profesional Indonesia yang ingin melanjutkan studi atau bekerja di Jerman (Goethe-Institut, 2016).

Sedangkan, di bidang kebudayaan, Goethe-Institut secara aktif menyelenggarakan berbagai program seni dan pertunjukan budaya, termasuk pemutaran film, pameran seni rupa, diskusi publik, pertunjukan musik, serta teater kontemporer. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan seniman Jerman maupun

Indonesia, baik dalam bentuk kolaborasi maupun pertukaran budaya. Salah satu kegiatan yang cukup menonjol adalah festival kebudayaan seperti *Deutsches Fest 2015*, yang memperkenalkan Jerman dari berbagai aspek, mulai dari budaya, pendidikan, teknologi, hingga bisnis. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum (Aziz dkk, 2021).

Goethe-Institut juga berperan dalam memperkuat jejaring komunitas dan dialog antarbudaya melalui program-program seperti residensi seniman, *workshop* lintas budaya, pelatihan kewirausahaan di sektor kreatif, dan kerja sama dengan lembaga- lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, Goethe-Institut bekerja sama dengan berbagai aktor non-negara, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang kontekstual dan relevan bagi masyarakat Indonesia (Reuter, 2019). Selain itu, Goethe-Institut juga menyediakan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan pusat informasi budaya yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Perpustakaan Goethe-Institut tidak hanya berisi literatur dan media dalam bahasa Jerman, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan literasi seperti klub buku, diskusi film, dan seminar sastra. Dengan cara ini, lembaga ini turut membangun pemahaman publik Indonesia tentang dinamika sosial dan budaya kontemporer di Jerman.

Sebagai bagian dari misi pendidikan dan penguatan kapasitas, Goethe-Institut juga menjalankan program “PASCH – Sekolah Mitra Masa Depan” (*Partnerschulinitiative*) yang bekerja sama dengan sejumlah sekolah menengah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendukung pengajaran

bahasa Jerman di sekolah-sekolah mitra melalui penyediaan pelatihan guru, bahan ajar, serta kegiatan ekstrakurikuler yang memperkenalkan budaya Jerman kepada para pelajar (Goethe-Institut, 2016). Program PASCH memberikan peluang yang lebih luas kepada pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi ke Jerman dengan bekal persiapan yang lebih matang dalam aspek bahasa dan kebudayaan.

Di ranah pendidikan tinggi, Goethe-Institut juga menjadi penghubung bagi calon mahasiswa Indonesia yang tertarik menempuh studi di Jerman. Lembaga ini secara rutin menyelenggarakan seminar dan sesi informasi terkait sistem pendidikan tinggi di Jerman, prosedur aplikasi, beasiswa, dan kehidupan mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan secara independen maupun bersama mitra strategis seperti *DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)*. Dengan demikian, Goethe-Institut tidak hanya berfungsi sebagai institusi kebudayaan, tetapi juga sebagai jembatan akademik antarnegara. Seluruh program yang dijalankan oleh Goethe-Institut tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki posisi sentral dalam pelaksanaan diplomasi budaya Jerman di Indonesia.

Di tengah intensifnya pelaksanaan strategi diplomasi budaya Jerman melalui Goethe-Institut, penulis merasa penting untuk menelusuri bagaimana Indonesia merespon strategi tersebut. Respon ini tidak hanya berbentuk kebijakan formal dari pemerintah, tetapi juga dapat dilihat dari partisipasi lembaga pendidikan, dan masyarakat umum dalam berbagai program budaya tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelaah secara mendalam

respon Indonesia terhadap strategi diplomasi budaya Jerman melalui Goethe-Institut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam studi hubungan internasional yang membahas topik diplomasi budaya, penetapan ruang lingkup kajian secara jelas dan terarah menjadi hal yang esensial. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembahasan yang terlalu melebar dan menyimpang dari fokus utama analisis. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada strategi diplomasi budaya yang dijalankan oleh Pemerintah Jerman melalui Goethe-Institut, serta bagaimana respons yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap strategi tersebut. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini dibatasi pada program-program kebudayaan yang diselenggarakan oleh Goethe-Institut, yang merepresentasikan pelaksanaan kebijakan luar negeri Jerman dalam ranah kebudayaan.

Adapun waktu kajian dalam penelitian ini dibatasi pada periode pasca-ditandatanganinya *German-Indonesian Joint Declaration for a Comprehensive Partnership* tahun 2012, dengan fokus pada aktivitas Goethe-Institut selama satu dekade terakhir (2012–2022). Rentang waktu ini dipilih karena dianggap sebagai fase penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia–Jerman secara menyeluruh, termasuk intensifikasi kerja sama di bidang budaya dan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam pertanyaan utama sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi diplomasi budaya Jerman melalui Goethe-Institut?

- b. Bagaimana respon Indonesia terhadap strategi diplomasi budaya Jerman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi strategi diplomasi budaya yang dijalankan oleh Jerman melalui Goethe-Institut.
2. Untuk melihat bagaimana respon Indonesia terhadap strategi diplomasi budaya yang dijalankan oleh Jerman melalui Goethe-Institut.

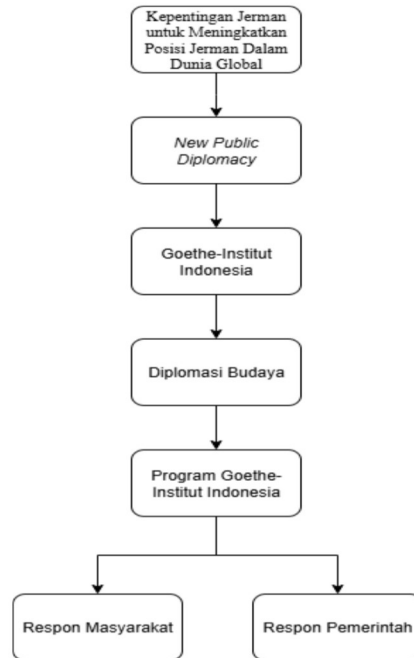
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi terhadap studi hubungan internasional, khususnya terkait konsep new public diplomacy dan diplomasi budaya antara dua negara.
2. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas diplomasi budaya negara-negara lain di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.
3. Memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi budaya dalam merespons diplomasi budaya asing.

E. Kerangka Konseptual

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual



1. *New Public Diplomacy*

New public diplomacy merupakan sebuah konsep yang berasal dari pengembangan diplomasi publik. Konsep *new public diplomacy* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk diplomasi publik, yang mana aktor internasional berupaya membangun hubungan dengan publik global, dengan menekankan peran aktor non-negara seperti NGO dalam praktiknya. Dalam *new public diplomacy*, mekanisme terjadi adanya pergeseran mekanisme komunikasi dan konsep propaganda yang berubah menjadi pembentukan *nation branding*. Hal ini membuat *new public diplomacy* menjadi suatu model diplomasi yang bersifat horizontal dengan berbasis hubungan untuk menjalin keterikatan dengan publik internasional (Cull, 2009).

Melissen mendefinisikan *new public diplomacy* sebagai jenis diplomasi publik di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor kunci dan tidak lagi berkomunikasi dengan audiens internasional secara satu arah. Sebaliknya, diplomasi publik kontemporer telah berkembang menjadi proses komunikasi dua arah yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Tujuannya adalah untuk membina hubungan jangka panjang dan partisipatif dengan komunitas global. Strategi ini mempengaruhi bagaimana negara membangun hubungan dengan komunitas internasional berdasarkan saling pengertian. Dengan demikian, *new public diplomacy* merupakan bagian dari sistem diplomasi yang lebih kompleks dan komprehensif yang mengedepankan cita-cita, identitas, dan kemitraan kolaboratif dalam pelaksanaannya. (Melissen, 2005).

Karakteristik dari *new public diplomacy* sendiri ditandai dengan aktor keterlibatan aktor yang lebih luas, yaitu aktor negara, NGO, dan aktor non-negara, menihilkan batasan antara informasi domestik dengan internasional. Selain itu, *new public diplomacy* juga melakukan pendekatan melalui pembangunan jaringan diplomasi global serta *nation branding* sehingga menekankan sifat *soft power* sebagai suatu hal yang ditonjolkan. Arah penekanan *new public diplomacy* juga berfokus dalam membangun hubungan dengan masyarakat global, yang mana peran dan interaksi bersifat horizontal dan difasilitasi oleh aktor terkait (Cull, 2009).

Dalam penelitian ini, strategi diplomasi budaya Jerman dianalisis untuk memahami bagaimana strategi tersebut diterapkan dan apa

kepentingan yang ingin dicapai oleh Jerman melalui Goethe-Institut, yang mana ini tergambarkan dalam respons Indonesia sebagai *host country*.

2. Diplomasi Budaya

Pada era kontemporer saat ini, diplomasi tidak hanya berkisar pada pertemuan formal antar negara atau pertukaran nota diplomatik saja, melainkan telah meluas pada bentuk-bentuk interaksi yang lebih halus dan tidak langsung, salah satunya adalah diplomasi budaya. Diplomasi budaya menjadi bentuk kekuatan lunak (*soft power*) yang strategis dalam membangun citra suatu negara, memperkuat pengaruhnya di dunia internasional, dan menjalin hubungan jangka panjang yang berbasis pada pemahaman dan apresiasi budaya.

(Clarke, 2020) menjelaskan bahwa diplomasi budaya merupakan salah satu elemen turunan dari diplomasi publik, yang pada gilirannya merupakan manifestasi dari penerapan konsep kekuatan lunak (*soft power*). Dalam bagian ini, budaya diangkat menjadi “aset nasional yang membentuk identitas dan dapat dimobilisasi untuk mencapai kepentingan dalam konteks hubungan internasional”. Penggunaan budaya sebagai instrumen diplomatik dianggap mampu menjangkau publik luar negeri secara lebih simpatik dan afektif dibandingkan pendekatan- pendekatan koersif atau ekonomi murni.

Dalam pelaksanaannya, diplomasi budaya sering kali mengambil bentuk konkret seperti pertukaran pelajar, program beasiswa, festival budaya, pertunjukan seni, pelatihan bahasa, dan penyelenggaraan pusat-pusat budaya di luar negeri. Tujuannya adalah menciptakan "*attraction*" dan

"*mutual understanding*" yang pada gilirannya akan membentuk persepsi positif terhadap negara pengirim, serta mendukung tujuan strategis jangka panjang seperti memperkuat hubungan ekonomi, pendidikan, dan politik (Nye, 2004; Zaharna, 2010). Dalam konteks Jerman, diplomasi budaya telah menjadi salah satu pilar utama kebijakan luar negerinya sejak lama, dengan Goethe-Institut sebagai aktor utama. Jerman secara konsisten memandang diplomasi budaya tidak hanya semata-mata sebagai sarana untuk memperkuat citra nasionalnya, namun juga sebagai investasi dalam membangun jaringan pengetahuan dan kepercayaan jangka panjang dengan negara-negara mitra. Goethe-Institut, misalnya, menjalankan berbagai program pengajaran bahasa, pertukaran budaya, dan kolaborasi seni sebagai bentuk nyata dari strategi diplomasi budaya Jerman di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik kualitatif sebagai kerangka kerja utama untuk menyelidiki subjek yang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah strategi dalam ilmu sosial yang menekankan fleksibilitas dalam desain penelitian dan diarahkan pada data empiris yang dikumpulkan dalam latar yang bersifat naturalistik. Metode ini menggunakan data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Pendekatan ini dibedakan dengan penekanannya pada subjektivitas baik dari partisipan

maupun peneliti dalam menginterpretasikan makna yang mendasari fenomena sosial yang diamati. Penelitian kualitatif sering kali mengeksplorasi sejumlah kecil kasus secara mendalam dan kontekstual, dengan fokus pada interpretasi kualitatif melalui analisis deskriptif atau naratif dibandingkan dengan metodologi statistik atau numerik (Hammersley, 2013).

Secara lebih detail, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berfokus dalam menjabarkan fakta ataupun suatu fenomena sosial secara sistematis dan akurat dalam menganalisis sifat-sifat obyek penelitian (Hardani, et al., 2020). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan oleh penulis karena dinilai lebih cocok dalam menjelaskan bagaimana diplomasi budaya Jerman diimplementasikan melalui Goethe-Institut sekaligus melihat respons Indonesia terhadap hubungan bilateral kedua negara.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk menunjang hasil penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didefinisikan sebagai data yang diperoleh tidak melalui sumber langsung dari obyek penelitian, melainkan didapatkan dari berbagai data yang relevan. Data tersebut umumnya berbentuk laporan dari pemerintah dan organisasi internasional, dokumen pribadi, artikel surat kabar, buku, atau jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan

metode studi dokumentasi melalui penelusuran literatur. Metode ini didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis dan terekam berbentuk laporan dari pemerintah dan organisasi internasional, dokumen pribadi, artikel surat kabar, buku, atau jurnal. Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan diplomasi budaya Jerman di Indonesia, khususnya melalui Goethe-Institut, yang dihimpun dari buku, artikel jurnal, berita, hingga rilisan resmi dari website institusi terkait.

4. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, penelitian ini selanjutnya akan melakukan analisis dengan menerapkan metode *process-tracing*. Metode *process-tracing* didefinisikan sebagai suatu metode pemeriksaan sistematis terhadap bukti-bukti diagnostik yang dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Dalam penelitian ini, metode *process-tracing* digunakan dalam mengidentifikasi, memvalidasi, dan menguji hubungan sebab-akibat dalam upaya diplomasi budaya Jerman di Indonesia melalui Goethe-Institut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *New Public Diplomacy*

Diplomasi publik dapat didefinisikan sebagai upaya dari aktor dalam mengatur lingkungan internasional yang berkaitan dengannya melalui pembangunan relasi dengan publik ataupun masyarakat dari luar negeri (Cull, *Public Diplomacy: Lessons from the Past*, 2009). Berdasarkan definisi tersebut, diplomasi publik dapat dipahami sebagai proses yang dijalankan oleh suatu negara dengan tujuan untuk menjalin hubungan langsung dengan publik dari negara lain. Dimana pada pelaksanaannya, sasaran diplomasi publik tidak hanya mencakup khalayak luas, tetapi juga mencakup tokoh-tokoh kunci atau individu-individu berpengaruh yang memiliki kapasitas untuk membentuk opini dan mempengaruhi pandangan masyarakat luas.

Dalam melakukan diplomasi publik, aktor perlu memahami permintaan dari kelompok target, kemudian menyesuaikan diplomasi tersebut melalui pendekatan yang sesuai dengan target. Dengan kata lain, diplomasi publik berbeda dengan propaganda yang secara eksplisit bertujuan untuk memengaruhi publik. Diplomasi publik adalah aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi guna menarik perhatian publik ataupun organisasi dari negara lain. Ketertarikan tersebut diharapkan dapat mendorong munculnya pemahaman yang lebih baik dari target ataupun terhadap satu sama lain, sehingga pengaruh atau kekuasaan negara pun akan meningkat. Diplomasi publik dapat dikatakan sebagai upaya untuk memengaruhi opini dari publik

melalui presentasi nilai-nilai tertentu guna mendukung kepentingan dari aktor pelaku diplomasi.

Selain definisi yang telah disebutkan sebelumnya, diplomasi publik juga dilihat sebagai upaya dari aktor untuk menjalin relasi dengan publik dari negara lain secara langsung. Adanya hubungan yang dekat dengan publik dinilai dapat membantu aktor dalam mencapai kepentingan dan meningkatkan nilai yang dimiliki oleh aktor (Sharp, 2005). Aktor dalam diplomasi publik tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan aktor non pemerintah, sub-nasional, dan supra-nasional, dimana diplomasi yang dilakukan akan dikembangkan sesuai dengan kepentingan masing-masing aktor. Walaupun terkadang diplomasi publik tidak memberikan hasil yang maksimal, diplomasi dapat meningkatkan ketertarikan publik terhadap negara, yang selanjutnya menunjukkan efektivitas diplomasi publik dalam memengaruhi aktor lain dalam sistem internasional (Melissen, *The new public diplomacy: Between theory and practice*, 2005).

Diplomasi publik dijelaskan sebagai proses satu arah dalam menyampaikan informasi mengenai aspek-aspek positif dari suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi para aktor untuk menyampaikan informasi secara konsisten melalui dialog. Dengan cara ini, diplomasi publik dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung kepentingan nasional para aktor. Dalam implementasinya, diperlukan penentuan aspek ataupun nilai yang tepat untuk dilibatkan dalam diplomasi publik, bersamaan dengan menghindari nilai yang memicu perspektif negatif dari publik, sehingga hasil yang didapatkan dari

diplomasi tersebut merupakan hasil positif yang mendukung kepentingan aktor.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya memunculkan aktor-aktor baru dalam diplomasi yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah, seperti organisasi non-pemerintah, bahkan komunitas masyarakat (Riordan, 2005). Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk mengadaptasi kebijakan luar negeri yang baru karena aktor yang terlibat tidak lagi hanya pemerintah dan negara, melainkan melibatkan jaringan non negara yang lebih kompleks. Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah dengan aktor non-pemerintah menjadi salah satu bagian dalam pelaksanaan diplomasi yang lebih modern (Riordan, 2005).

Pemerintah tetap menjadi pelaku utama dalam diplomasi terhadap pemerintah dari negara lain. Namun, dalam interaksinya dengan masyarakat yang lebih luas, pemerintah dinilai tidak memiliki kredibilitas karena relasinya dengan pemerintah negara tersebut, terlebih pada situasi ketika pemerintah dan masyarakat tidak memiliki posisi yang sejalan. Di samping itu, relasi yang terlalu dekat antara masyarakat dan diplomat (sebagai perwakilan dari luar negeri) kerap memunculkan sentimen negatif sehingga pemerintah tidak dinilai sebagai aktor yang kredibel dalam diplomasi terhadap publik (Riordan, 2005). Sebaliknya, aktor non pemerintah dianggap tidak memiliki motif politik yang khusus dalam relasinya dengan masyarakat. Bahkan, aktor non pemerintah terkadang memiliki posisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, aktor non pemerintah dinilai memiliki kredibilitas lebih kuat dalam

aktivitas diplomasi publik (Riordan, 2005).

Cull (2009) menyebutkan enam instrumen yang dapat digunakan dalam melaksanakan diplomasi publik untuk mengelola lingkungan internasional yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. *Listening* (mendengarkan), yaitu upaya untuk mengumpulkan data-data terkait publik dan opininya dalam lingkungan internasional. Pada praktiknya, elemen ini membuat diplomasi publik dilakukan dengan fokus pada penerimaan informasi dibandingkan dengan pemberian informasi, yang dinilai lebih efektif untuk dilakukan dalam diplomasi publik.
- b. *Advocacy* (advokasi), yaitu upaya untuk membentuk komunikasi internasional dengan tujuan mempromosikan kebijakan, ide, maupun kepentingan tertentu kepada publik internasional.
- c. *Cultural diplomacy* (diplomasi budaya), yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mempopulerkan budaya suatu negara. Pada praktiknya, negara akan memfasilitasi transmisi budaya negaranya ke luar negeri, baik secara formal ataupun non formal, agar publik di luar negeri dapat lebih familiar dengan budaya yang dimiliki oleh suatu negara. Familiaritas dinilai dapat mendorong publik untuk mengubah opininya sesuai dengan kepentingan negara pelaku diplomasi. Di era modern, diplomasi budaya juga dilakukan oleh organisasi non pemerintah. Hal itu untuk menghindari kesan tujuan diplomatik yang umum dilakukan oleh

pemerintah, yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat umum dalam menanggapi aktivitas diplomasi suatu negara.

- d. *Exchange diplomacy* (diplomasi pertukaran), yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengirimkan beberapa warga negara ke luar negeri serta menerima kedatangan warga asing ke dalam negeri sebagai bentuk akulturasi.
- e. *International broadcasting* (siaran internasional), yaitu strategi komunikasi yang memanfaatkan penggunaan media seperti radio, televisi, dan platform daring untuk menjangkau dan membangun kedekatan dengan publik di negara lain.
- f. *Psychological warfare* (konflik psikologis), yaitu upaya aktor dalam menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu konflik, biasanya melalui komunikasi dengan publik dari lawan. Akan tetapi, instrumen ini dinilai kontroversial untuk dilibatkan dalam konteks diplomasi publik sehingga hampir tidak pernah dipraktikkan dalam hubungan internasional, kecuali dalam situasi konflik.

Berdasarkan enam jenis diplomasi publik yang dijabarkan oleh Cull, penulis selanjutnya menggunakan diplomasi budaya untuk menganalisis strategi yang dilakukan Jerman di Indonesia melalui Goethe-Institut dan melihat bagaimana respons Indonesia dalam menerima aktivitas diplomasi budaya yang diimplementasikan oleh Goethe-Institut.

B. Diplomasi Budaya

Berdasarkan instrumen diplomasi publik yang diutarakan oleh Cull

(2009), penulis menggunakan salah satu instrumen yaitu diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan bagian dari diplomasi publik yang secara khusus berfokus pada pemanfaatan soft power sebagai instrumen utama. Soft power dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain untuk mencapai tujuannya, tidak melalui tekanan militer atau ekonomi, tetapi melalui daya tarik yang muncul dari kekayaan budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan yang dianggap menarik oleh negara lain (Nye, 2004). Konsep diplomasi budaya dalam konteks ini dipahami secara lebih spesifik sebagai pemanfaatan sumber daya budaya suatu negara untuk menarik perhatian masyarakat dari negara lain. Dalam praktiknya, diplomasi budaya merupakan strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor, baik negara maupun non-negara, untuk memengaruhi dinamika lingkungan internasional melalui penggunaan elemen-elemen budaya yang diakui secara global, atau dengan memfasilitasi penyebaran budaya nasional ke luar negeri. Dengan kata lain, diplomasi budaya dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan yang dirancang oleh suatu negara untuk mendukung dan mendorong proses ekspor budaya ke ranah internasional (Cull, 2008).

Diplomasi budaya sendiri berangkat dari fakta bahwa budaya bersifat universal dan dapat menembus sekat-sekat geopolitik. Kendati setiap negara memiliki budaya yang unik, khas, dan beragam, pertukaran serta perjumpaan budaya antarnegara dapat menjadi jembatan untuk mempererat saling pengertian dan pemahaman di antara mereka. Budaya merujuk pada sekumpulan nilai-nilai luhur, kebiasaan sosial, serta ciri khas masyarakat yang

diteruskan secara turun-temurun antar generasi. Semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia memberikan sumbangan terhadap pembentukan kebudayaan (Soemardjan & Soekanto, 1976). Kebudayaan ini yang kemudian diperlukan manusia untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya, sehingga daya dan hasilnya dapat diabadikan dalam kehidupan masyarakat.

Tidak ada definisi yang pasti terkait budaya. Secara tradisional, dalam konteks diplomasi budaya, istilah budaya sering kali merujuk pada '*high culture*', yang mencakup seni, bahasa, tarian, dan bentuk-bentuk budaya lain yang biasanya dinikmati oleh kaum elit intelektual. Namun, di era modern, budaya yang termasuk dalam diplomasi budaya juga melibatkan budaya populer, yakni sebuah aktivitas kultural yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens dalam jumlah besar (Mark, 2009). Oleh karena itu, diplomasi budaya merupakan konsep yang luas dan tidak terbatas pada bentuk-bentuk budaya tertentu.

Mark (2009) menjelaskan beberapa elemen penting yang terdapat dalam diplomasi budaya, yakni adanya keterlibatan aktor dan pemerintah, tujuan, aktivitas, dan audiens.

1. Keterlibatan Aktor dan Pemerintah

Diplomasi budaya erat kaitannya dengan aktivitas diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Walaupun dalam sebagian kegiatan diplomasi pemerintah tidak terlibat secara langsung, diplomasi budaya umumnya dilakukan dengan tujuan untuk membantu kebijakan luar negeri, diplomasi

pemerintah, ataupun keduanya. Karena keterkaitannya dengan kebijakan luar negeri ataupun diplomasi pemerintah, diplomasi budaya biasanya melibatkan aktor pemerintah, baik secara langsung dimana pemerintah menjadi aktor dalam diplomasi budaya ataupun secara tidak langsung dimana pemerintah hanya memfasilitasi pelaksanaan diplomasi budaya oleh aktor non pemerintah. Namun, secara garis besar, aktivitas budaya yang ditujukan untuk audiens dari negara lain tidak dapat dikategorikan sebagai diplomasi budaya jika tidak ada dukungan ataupun keterlibatan dari pemerintah.

2. Tujuan

Secara tradisional, diplomasi budaya bertujuan untuk mencapai saling pengertian, mengatasi etnosentrisme dan stereotip, serta mencegah konflik. Secara fungsional, diplomasi budaya dilakukan untuk memenuhi kepentingan suatu negara, yang meliputi aspek perdagangan, ekonomi, politik, dan diplomasi. Namun secara umum, meningkatkan reputasi suatu negara di mata dunia adalah tujuan utama dari diplomasi budaya.

Dalam praktiknya, diplomasi budaya tidak hanya menunjukkan budaya dari suatu negara, tetapi mempresentasikan budaya negara secara strategis agar berpengaruh secara positif pada citra nasional. Oleh karena itu, diplomasi budaya tidak terbatas hanya pada pengenalan budaya, tetapi terkadang juga diarahkan untuk menunjukkan aspek tertentu, misalnya kemajuan teknologi ataupun ekonomi suatu negara, yang diharapkan dapat memberikan citra positif bagi negara. Dengan

menunjukkan diri sebagai negara yang maju, hal tersebut diharapkan dapat membantu untuk mencapai kepentingan ekonomi karena negara terlihat sebagai negara modern yang menarik untuk menjadi mitra kerja sama. Pada audiens yang lebih umum, citra negara yang modern dapat menambah daya tarik negara di bidang pariwisata dan pendidikan—dalam bentuk pertukaran pelajar, bahkan menarik tenaga kerja asing terampil.

3. Aktivitas

Diplomasi budaya terdiri dari aktivitas yang dilakukan oleh berbagai jenis partisipan melalui manifestasi dari karya partisipan itu sendiri, pertukaran individu—misalnya dalam hal akademik, serta pengenalan budaya dari suatu negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa cakupan aktivitas dalam diplomasi budaya sangat luas, tidak terbatas pada *high culture* yang diproduksi dan dinikmati oleh kalangan elit. Pada era modern, diplomasi budaya justru cenderung ditargetkan pada publik yang lebih umum, misalnya melalui beasiswa pendidikan, pertunjukan seni kelompok budaya, seminar, festival, dan lain-lain. Dengan kata lain, diplomasi budaya di era kontemporer ini tidak lagi dibatasi pada acara formal yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik, berbeda dengan diplomasi budaya tradisional.

4. Audiens

Diplomasi budaya bertujuan untuk mempromosikan budaya dari negara pelaku diplomasi ke negara tujuan diplomasi. Namun, untuk

mencapai tujuan tersebut, negara yang melakukan diplomasi juga perlu untuk mendukung manifestasi aktivitas kebudayaan dari negara target karena dinilai dapat mempermudah implementasi diplomasi budaya di kemudian hari. Mendukung aktivitas kebudayaan dari negara target dianggap dapat memperkuat hubungan bilateral antara negara asal dengan negara target. Selain itu, negara juga perlu untuk menargetkan diaspora dari negara itu sendiri sebagai audiens dari diplomasi budaya. Hal tersebut karena dengan memahami budaya dari negara asalnya, diaspora diharapkan dapat membantu proses diplomasi dengan mempromosikan budaya dari negara itu sendiri.

Agar diplomasi budaya dapat mencapai potensi terbaiknya, terdapat tiga aspek yang perlu dipahami dan dimengerti oleh pelaku diplomasi (Mark, 2009). Pertama, diplomasi budaya umumnya dilakukan oleh dan di bawah pengawasan pemerintah. Hal itu membuat diplomasi budaya dilakukan dengan merefleksikan kebijakan pemerintah ataupun menunjukkan citra tertentu yang dapat mendukung kepentingan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah akan menghalangi presentasi budaya yang dinilai problematik dan dapat berpengaruh negatif pada kepentingan pemerintah. Dengan kata lain, budaya yang ditampilkan dalam diplomasi budaya umumnya diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan negara. Kondisi itu mendorong ketidakjujuran dalam mengekspresikan budaya, dimana budaya yang dilihat oleh audiens justru bukan merupakan budaya yang sebenarnya terjadi. Untuk dapat mencapai diplomasi budaya yang sesungguhnya, pelaksanaan diplomasi oleh

aktor independen menjadi penting karena dengan begitu, aktivitas diplomasi budaya tetap dapat terlaksana, tetapi tetap dengan menampilkan budaya negara yang apa adanya.

Kedua, untuk mencapai potensi yang maksimal, aktor pelaku diplomasi budaya harus memahami kaitan antara diplomasi budaya dengan *nation branding*. *Nation branding* merupakan strategi yang digunakan untuk membentuk dan memperkuat reputasi atau citra tertentu dari suatu negara di mata dunia, yang dimana salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui diplomasi budaya. Pelaksanaan diplomasi budaya harus disesuaikan dengan citra yang direncanakan oleh negara, yakni dengan menunjukkan budaya-budaya tertentu yang berpengaruh positif pada citra itu sendiri. Hal itu agar citra yang selama ini dibangun oleh negara tidak terlihat palsu. Oleh karena itu, agar diplomasi budaya berjalan dengan maksimal, diplomasi budaya harus sejalan dengan *nation branding* dari negara.

Ketiga, potensi diplomasi budaya berkaitan dengan kepentingan domestik negara, sehingga diplomasi tidak hanya dilakukan kepada publik di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri, khususnya pada diaspora. Diplomasi budaya berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan kelompok minoritas yang berasal dari negara lain, yakni dengan menunjukkan bahwa kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat negara pelaku diplomasi secara inklusif. Dengan demikian, diplomasi budaya dapat mendorong terjadinya kohesi nasional, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan rasa

kedekatan dari kelompok asing tersebut terhadap negara tertentu. Hal itu umumnya dilakukan dengan cara memanfaatkan figur publik yang berasal atau memiliki keturunan dari negara lain, bahkan mendukung aktivitas figur publik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori diplomasi budaya digunakan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Goethe-Institut di Indonesia dan bagaimana respons Indonesia dalam menghadapi aktivitas diplomasi budaya yang dilaksanakan oleh Jerman. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan empat elemen diplomasi budaya yang telah dijelaskan oleh Mark (2009) untuk memastikan bahwa strategi yang dilakukan oleh Goethe-Institut termasuk ke dalam aktivitas diplomasi budaya.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan ataupun gambaran terkait topik penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu sendiri merupakan segala bentuk publikasi yang telah diterbitkan sebelumnya, yang dinilai relevan dengan topik penelitian yang diambil oleh penulis. Dengan menggunakan penelitian terdahulu, penulis dapat memahami konteks penelitian dengan lebih mendalam untuk menemukan kebaruan ataupun titik yang belum dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, selanjutnya penulis menggunakan beberapa literatur yang membahas tentang Goethe-Institut sebagai tinjauan pustaka.

Penelitian pertama merupakan artikel jurnal dari Ming Huang (2023)

dengan judul ***Otherness and Suspiciousness: A Comparative Study of Public Opinions between the Confucius Institute and Goethe-Institut in Developing Countries***. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan institusi Goethe-Institut dengan Confucius Institute dalam hal citra yang dibentuk sebagai strategi diplomasi melalui promosi bahasa dan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa Goethe-Institut membentuk citra yang cenderung positif dan digambarkan sebagai NGO yang bersahabat dan kooperatif dalam bidang pendidikan serta kebudayaan. Sementara itu, Confucius Institute justru membentuk citra keterkaitan dengan pemerintah Tiongkok. Ini membuat Goethe-Institut mampu memberikan persepsi publik yang positif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Huang adalah penggunaan Goethe-Institut sebagai salah satu variabel yang diteliti. Namun, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian Huang karena penelitian Huang terfokus pada penelitian terkait kebahasaan, sedangkan penelitian ini membahas tentang diplomasi. Selain itu, penelitian Huang bertujuan untuk membandingkan aspek semantik dari Goethe-Institut dan Confucius Institute, sedangkan penelitian ini berusaha menjelaskan strategi diplomasi Jerman melalui Goethe-Institut.

Penelitian kedua merupakan penelitian Aziz, Affandi, & Akim (2021) dengan judul ***Deutsches Fest 2015 sebagai Sarana Diplomasi Publik Baru Goethe-Institut di Indonesia*** yang menggunakan teori *New Public Diplomacy*. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Deutsches Fest merupakan program yang dijalankan oleh Goethe-Institut sebagai NGO fasilitator budaya

dengan negara lain, menjembatani masyarakat global dengan kebudayaan Jerman. Hal ini membuat Goethe-Institut memiliki peranan penting sebagai NGO yang memainkan fungsi strategis dalam mempromosikan bahasa dan budaya Jerman di Indonesia melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan media digital serta kebutuhan masyarakat lokal. Melalui Deutsches Fest, Goethe-Institut menekankan peran diplomasi publik yang berfokus pada partisipasi masyarakat, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi lintas sektor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aziz, dkk., terletak pada pemilihan Goethe-Institut sebagai variabel dalam penelitian dan penggunaan *new public diplomacy* sebagai instrumen untuk menganalisis topik penelitian. Perbedaan terletak pada cakupan penelitian, dimana penelitian Aziz, dkk., secara spesifik terpusat pada acara Deutsches Fest 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan dalam cakupan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai instrumen yang digunakan oleh Goethe-Institut dalam diplomasi publiknya. Penulis juga menambahkan diplomasi budaya sebagai teori untuk memperjelas peran kultur dalam diplomasi yang dilakukan oleh Goethe-Institut terhadap Indonesia.

Ketiga adalah penelitian dari Lanshina (2015) yang berjudul ***The Goethe Institute and Soft Power***. Penelitian ini menemukan bahwa Goethe-Institut merupakan NGO yang dibentuk dalam mempromosikan bahasa dan budaya Jerman untuk meningkatkan citra negara tersebut ke arah yang lebih positif. Hal ini dibuktikan dengan kursus bahasa Jerman serta praktik diplomasi

budaya yang dilakukan di berbagai negara. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Goethe-Institut sebagai aktor NGO yang melakukan praktik diplomasi budaya secara efektif meningkatkan citra Jerman melalui adaptasi dengan konteks lokal sambil tetap menyampaikan nilai-nilai universal seperti kebebasan berekspresi, keterbukaan budaya, dan kerja sama lintas negara, sehingga memperkuat posisi Jerman secara strategis dalam arena global melalui citra budaya dan pendidikan yang progresif.

Penelitian Lanshina dengan penelitian ini memiliki variabel dan arah penelitian yang mirip. Perbedaan terletak pada jangkauan waktu penelitian, yang mana jangkauan akhir penelitian Lanshina adalah pada saat literatur tersebut dipublikasikan, yaitu tahun 2015, sedangkan penelitian ini mengambil jangkauan waktu mulai tahun 2012 hingga 2022. Jangkauan waktu yang berbeda diperkirakan akan memberikan data dan hasil penelitian yang berbeda pula walaupun menggunakan variabel dan teori yang sama.

Melihat ketiga penelitian terdahulu yang sudah ditinjau, celah yang akan penulis isi dalam penelitian terkait Goethe-Institut adalah dengan mencari tahu bagaimana strategi diplomasi budaya Jerman melalui institusi tersebut. Selain itu, penelitian penulis juga berfokus dalam melihat respons Indonesia sebagai *host country*, yang mana respons dari *host country* dari adanya Goethe-Institut belum dibahas secara lebih lanjut oleh penelitian sebelumnya.